



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Mayjend. S. Parman No. 2 Kendari, Telp. 0401-3126053 Fax. 0401-3126172
website : dpmptsp.sultraprov.go.id - email : info.dpmptsp@sultraprov.go.id



DETAIL DAN DAFTAR PERSYARATAN IZIN

Nama Izin : IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
Deskripsi : Izin pengumpulan uang atau barang lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sektor : SOSIAL
Delegasi : DINAS SOSIAL
Biaya : Tidak Ada
Durasi : 5 hari kerja
Perubahan Terakhir : 23 Jun 2025, Pukul 12:34:17 WITA
Ditetak Pada : 06 May 2026, Pukul 17:33:52 WITA

Persyaratan - Baru

No	Syarat	Deskripsi	Jenis Pemohon	Ket.	Format Persyaratan
1	Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : a. a. Nama Program Pengumpulan Uang atau Barang (PUB); b. Wilayah Penyelenggaraan lebih dari 1 Kabupaten/ Kota; c. Maksud dan Tujuan kegiatan (PUB); d. Periode Penyelenggaraan PUB; e. Cara PUB; f. Cara Penyaluran/Penggunaan hasil PUB.	Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : a. a. Nama Program Pengumpulan Uang atau Barang (PUB); b. Wilayah Penyelenggaraan lebih dari 1 Kabupaten/ Kota; c. Maksud dan Tujuan kegiatan (PUB); d. Periode Penyelenggaraan PUB; e. Cara PUB; f. Cara Penyaluran/Penggunaan hasil PUB.	Perusahaan	Wajib	-
2	Rekaman Identitas Pemohon	Rekaman Identitas Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
3	Rekaman NPWP Pemohon	Rekaman NPWP Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
4	Rekaman NPWP Perusahaan/Organisasi/Instansi	Rekaman NPWP Perusahaan/Organisasi/Instansi	Perusahaan	Wajib	-
5	Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Perusahaan	Wajib	-
6	Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha	Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha	Perusahaan	Wajib	-
7	Nomor Pokok Wajib Pajak LKS/ Ketua Panitia Penyelenggara PUB	Nomor Pokok Wajib Pajak LKS/ Ketua Panitia Penyelenggara PUB	Perusahaan	Wajib	-
8	Bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat sekretariat/Kantor/Penyelenggara	Bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat sekretariat/Kantor/Penyelenggara	Perusahaan	Wajib	-
9	Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB	Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB	Perusahaan	Wajib	-
10	Kartu Tanda Penduduk Direktur/Ketua	Kartu Tanda Penduduk Direktur/Ketua	Perusahaan	Wajib	-
11	Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua	Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua	Perusahaan	Wajib	-
12	Surat pernyataan bermeterai	Surat pernyataan bermeterai	Perusahaan	Wajib	-

	cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum	cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum			
13	Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	Wajib	-